

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Literatur

2.1.1 Literatur

Akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan positif secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan Akuntabilitas dan transparansi bertujuan untuk memastikan penggunaan dana desa yang tepat dan sesuai, sedangkan partisipasi masyarakat merupakan sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan manfaat yang dirasakan masyarakat dari program-program pemerintah Dengan demikian semakin baik akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat maka kesejahteraan masyarakat akan semakin baik (Anggraeni et al., 2023).

Penerapan akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa dalam Pembangunan Desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengelolaan keuangan desa dengan pengawasan yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong penggunaan dana desa secara tepat sasaran. Namun, tantangan dalam pelaksanaan musyawarah desa dan pertanggung jawaban mengindikasikan bahwa perlu adanya peningkatan mekanisme pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat (Novita, 2024)

Implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan desa. Prinsip-prinsip tersebut memiliki kontribusi

terhadap pembangunan desa yang memudahkan kontrol sosial dan pertanggung jawaban pemerintah desa yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Dengan demikian, ketiga prinsip tersebut menjadi instrumen penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa (Vanviora & Sari, 2023)

Penerapan prinsip, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan prinsip transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik akuntabilitas dan partisipasi masyarakat maka pengelolaan alokasi dana desa juga akan semakin baik, namun dalam transparansinya tidak berpengaruh signifikan, yang mungkin disebabkan karena kurangnya interaksi antara pihak pemerintah desa dan pihak masyarakat dalam penyampaian informasi terkait dengan dana desa (Nurfitri & Ratnawati, 2023).

Penguatan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sudah tergolong baik, transparansi keuangan desa yang sudah baik dapat dilihat dari akses informasi tersebut terbuka bagi siapa saja, terutama masyarakat desa. Begitu pula akuntabilitas dalam keuangan desa sudah tergolong baik dengan melihat persepsi masyarakat yang baik terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tentu saja menjadi cerminan kinerja mereka selama ini serta didukung dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP (Ngakil & Kaukab, 2020).

Pengaplikasian prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil Penelitian

menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, yang artinya apabila transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat ditingkatkan secara bersama maka semakin baik pula dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sudah terlaksana dengan baik dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, secara parsial transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat transparansi atau keterbukaan terkait dengan keuangan desa, serta masih banyak keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai keuangan desa (Yanti et al., 2023).

2.1.2 Kajian Literatur

2.1.2.1 Tata Kelola Keuangan

Tahap awal dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan visi misi adalah melakukan penganggaran agar dapat mengoptimalkan dana yang telah dialokasikan untuk mencapai tujuan pemerintahan (Latif et al., 2021). Dalam penggunaan anggaran harus sesuai dengan prioritas serta harus dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa diharapkan dapat menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). *Good governance* merupakan konsep pengelolaan pemerintahan yang dapat membawa ke arah lebih baik

dalam membentuk masyarakat yang sejahtera (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Dalam penerapan prinsip *good governance* terdapat 9 prinsip yang terdiri dari partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi kepada consensus, efektif dan efisien, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas. dan visi strategis (Prihatini & Kurniawan, 2021). Dengan demikian, penerapan prinsip *good governance* ini penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban kepada pihak yang berwenang terkait kinerja atau tindakan dalam organisasi (Making & Handayani, 2021). Pengukuran akuntabilitas dapat ditinjau dari sudut pandang pengendalian dan kinerja dari individu maupun unit organisasi (Sabir et al., 2022). Dengan demikian akuntabilitas merupakan konsep yang merujuk pada pertanggung jawaban untuk menjelaskan kinerja dan tindakan kepada pihak yang berwenang. Secara keseluruhan, konsep akuntabilitas penting dalam organisasi untuk memastikan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam meningkatkan kinerja dalam organisasi.

Dalam pemerintahan, pertanggung jawaban terkait kinerja organisasi disampaikan kepada masyarakat selaku pihak yang berhak atas pertanggungjawaban (Indraswari & Rahayu, 2021). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban kepada pihak yang berwenang terkait kinerja atau tindakan dalam organisasi (Making & Handayani, 2021). Pengukuran akuntabilitas dapat ditinjau dari sudut pandang pengendalian dan kinerja dari individu maupun unit organisasi (Sabir et al., 2022). Akuntabilitas dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja dan hasil

yang telah dicapai dalam unit organisasi. Secara keseluruhan, akuntabilitas dapat membantu dalam mencapai tujuan organisasi yang berfokus pada hasil dan perbaikan berkelanjutan.

2.1.2.3 Transparansi

Transparansi dalam pemerintahan berkaitan dengan pengungkapan hal hal secara berkala yang bersifat material kepada pihak yang memiliki kepentingan untuk mencapai prinsip keterbukaan informasi secara luas terkait dengan pengelolaan keuangan (Napisah & Taufiqurachman, 2020). Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar aparatur desa yang berwenang untuk mengelola keuangan desa dapat bertindak sesuai dengan ketentuan dalam menjalankan amanah dari masyarakat (Fajri & Julita, 2021).

Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam memastikan terkait dengan keterbukaan informasi. Adanya pengungkapan informasi secara berkala dan material, pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa sehingga dapat meminimalisir adanya dugaan terkait penyelewengan dan desa.

2.1.2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan aparatur desa yang akan membangun dan mendorong pemerintah desa dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa sesuai dengan prioritas dan nilai aktual masyarakat (Hariani et al., 2022). Dalam pembangunan desa, keterlibatan masyarakat harus ditekankan sehingga terdapat

hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Harahap et al., 2020).

Oleh karena itu dalam mewujudkan keterlibatan masyarakat dan pengelolaan dana desa harus dipastikan bahwa partisipasi masyarakat dapat tercermin melalui komunikasi yang efektif antara masyarakat dan aparatur desa dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa yang dapat mendorong terwujudnya program-program yang telah direncanakan.

2.1.2.5 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang terkait dengan kehidupan masyarakat di pedesaan untuk mewujudkan perbaikan ekonomi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan desa (Samaun et al., 2022). Syarat utama dalam melaksanakan pembangunan desa yaitu melalui musyawarah pembangunan desa (musrenbang) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) (Sunarso, 2023). Forum tersebut melibatkan pemerintah desa dan juga masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjadi bagian aktif dalam tata pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai aktor dalam desa. Keterlibatan ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi

masyarakat terakomodasi dalam rencana pembangunan, sehingga dapat menciptakan hasil yang lebih relevan dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

2.2 Metodologi

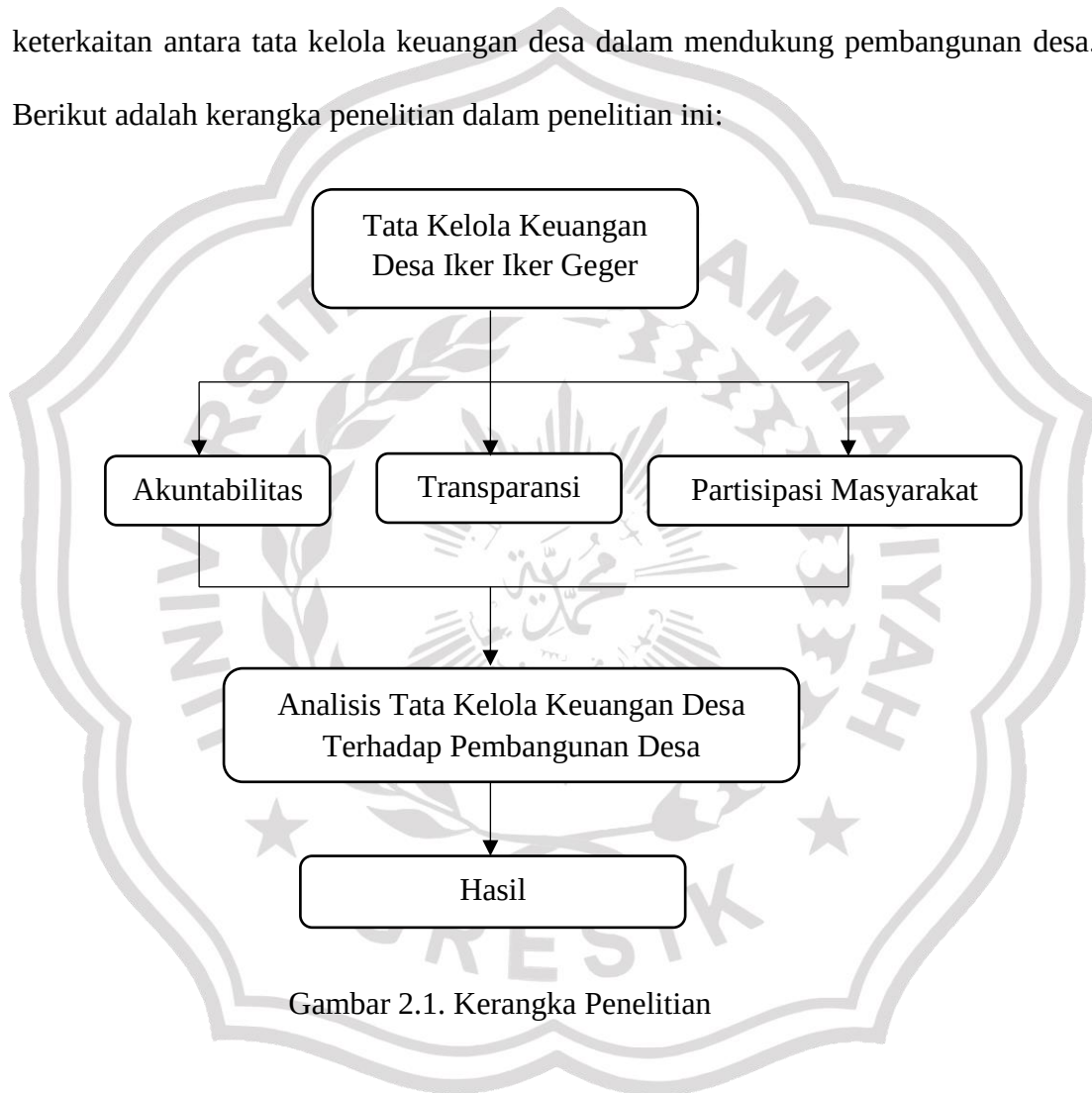
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang merupakan cara untuk mengetahui suatu fenomena kehidupan nyata secara mendalam (Yin, 2009). Metode penelitian ini efektif digunakan untuk menggali pemahaman yang spesifik dan sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memberi wawasan terkait dengan pengalaman, proses, atau kejadian yang sulit dipahami melalui pendekatan lain.

Dalam penelitian ini, studi kasus ini bertujuan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Desa Iker Iker Geger. Dengan menganalisis cara pengelolaan dana serta mengetahui tantangan yang dihadapi dan peluang yang ada, pendekatan ini membantu memahami bagaimana desa dapat mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam hal ini, studi kasus digunakan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan tata kelola keuangan desa sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Penggunaan metode ini dapat memungkinkan untuk menggali wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi pengelolaan dana desa yang baik, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang merupakan perlengkapan peneliti dalam menganalisa perencanaan dan asumsi (Syahputri et al., 2023). Penelitian ini mengembangkan kerangka penelitian yang akan menjelaskan keterkaitan antara tata kelola keuangan desa dalam mendukung pembangunan desa. Berikut adalah kerangka penelitian dalam penelitian ini:



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian